



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 900.1.3 / 31.12.2024 / WK- PYK / 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
900.1.3/31.47.448/WK-PYK/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa adanya surat dari Kepala SKPD perihal Usulan Perubahan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900.1.3/31.47.448/WK-PYK/2024 tentang Penetapan Pejabat untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

+

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900.1.3/31.47.448/WK-PYK/2024 tentang Penetapan Pejabat untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- KEDUA : Merubah ketentuan Lampiran II, yaitu Daftar Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada nomor urut:
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 19. Dinas Pertanian;
 28. Kecamatan Payakumbuh Utara.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Saudara Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
2. Saudara Pemimpin Bank Nagari Cabang Payakumbuh di Payakumbuh.
3. Saudara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu.
5. Ar s i p

LAMPIRAN II :
 NOMOR :
 TENTANG :

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
 900.1.3 / 31.12.30 / WK-PYE / 2025
 1 Maret 2025
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900.1.3 / 31.12.30 / WK-PYE / 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO	SKPD / UNIT SKPD	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PA	KPA	PEJABAT PELAKSANA APBD		KE
					PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PROGRAM : PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEGIATAN : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban dan Penyelenggaraan Kegiatan 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pertemuan Rutin PROGRAM : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Tangga Kantor 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4 Instalasi Komunikasi Telpu 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pertemuan Rutin PROGRAM : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah 1 Pengadaan Modal dan Jasa 2 Pengadaan Jasa	DONY PRAYUDA, S.STP NIP. 19770515 199703 1 001 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	RENY SURYA OKTAVIA, A.Md NIP. 19851005 2011101 2 001			
a.	Subretariat		DEWI NOVITA, S.STP, M.Si NIP. 19791214 200003 2 001 SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				RINTO ARIANTO NIP. 19820621 20100 1 1 002
b.	Bidang Ketert Ketransman						
c.	Bidang Perma						

PEJABAT PELAKSANA APBD

NO	SKPD / UNIT SKPD	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PA	KPA	PENERIMAAN	BENDAHARA	
						PENGELUARAN	PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya					
	Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan	1 Penyediaan Jasa Sural Menurati					
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Listrik					
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Umum Kantor					
	Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya					
		3 Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya					
b.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	: PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		JASRIYAL, S.Pt NIP. 19680701 199403 1 011 KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT			JAMRIL NIP. 19790613 200801 1 003
	Kegiatan	: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan	1 Penanganan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pertolongan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas saat Berhimpunsi Hak Asasi Manusia					
		2 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pengorganisasian dan Pengembangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		3 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Persepsi Diri dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Bimbingan, Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan					
c.	Bidang Pemadam Kebakaran	: PENGELOMPOKAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		BAMBANG HERMANTO, S.T. M.SE,MA NIP. 19791004 200501 1 006 KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN			AFRIZAL CAN, SE NIP. 19790413 200401 1 006
	Kegiatan	: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Dahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan	1 Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		2 Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		3 Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Kegiatan	: Investigasi Kejadian Kebakaran					
	Sub Kegiatan	1 Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran, Meliputi penelitian dan Pengujian					
		2 Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran					
	Kegiatan	: Penanggulangan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					

4

NO	SKPD / UNIT SKPD	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PA	KPA	PEJABAT PELAKSANA APBD		KE
					PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
1		1 Sub Kegiatan 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					
		Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					
		Sub Kegiatan 1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia					

